

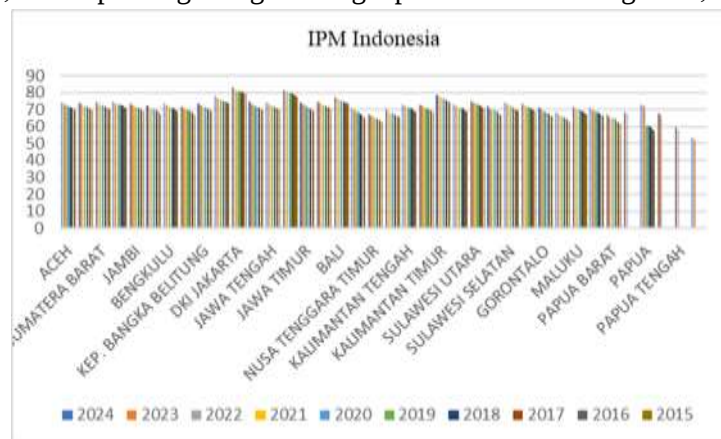
Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pranoto, A. A. (2026). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015–2024. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(3), 4918-4931. <https://doi.org/10.63822/hvh8pk77>

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan akselerasi teknologi yang semakin pesat, persaingan antarbangsa semakin ketat sehingga menuntut setiap negara untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang (Althira et al., 2025). Untuk mengukur keberhasilan kualitas SDM digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai alat ukur komprehensif pembangunan kualitas hidup melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Putri, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia terus meningkat dari 69,55 pada 2015 menjadi 75,02 pada 2024. Seluruh indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan, seperti Umur Harapan Hidup mencapai 74,15 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,21 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,85 tahun. Berdasarkan data BPS 2024, IPM DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan 83,08, diikuti DIY dengan 81,55, dan Papua Pegunungan sebagai posisi terendah dengan 53,42.



Gambar 1. IPM Indonesia 2015-2024
(Sumber: BPS data diolah, 2026)

BPS mengkategorikan IPM ke dalam empat kategori: rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Nilai IPM tinggi umumnya memiliki harapan hidup lebih panjang, sistem pendidikan lebih memadai, serta pendapatan masyarakat meningkat (Fauziah, 2024). Di Jawa Timur, IPM Kota Surabaya menempati posisi tertinggi dengan 84,14, sedangkan Kabupaten Sampang terendah dengan 64,65. IPM di setiap kabupaten/kota Jawa Timur periode 2015-2024 mengalami fluktuasi yang sering menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Alif et al., 2021).



Gambar 2. IPM Kabupaten/Kota Jawa Timur 2015-2024
Sumber: BPS (data diolah, 2026)

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan. Alokasi anggaran pendidikan merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebesar 20% dari APBN dan APBD (Aulia et al., 2023). Selama periode 2015-2024, pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Timur selalu mengalokasikan anggaran pendidikan dengan peningkatan yang beragam, mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas SDM.



Gambar 3. Realisasi Anggaran Pendidikan Kab/Kota Jawa Timur
(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data diolah, 2026)

Di samping itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan anggaran kesehatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan (Simamora et al., 2025). Anggaran kesehatan mengalami peningkatan yang beragam setiap tahunnya. Semakin besar anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, semakin besar pula pengaruhnya terhadap IPM (Darwin, 2022).



Gambar 4. Realisasi Anggaran Kesehatan Kab/Kota Jawa Timur
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah, 2026)

Selain anggaran pendidikan dan kesehatan, penerimaan pajak daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai program pembangunan manusia (Putri et al., 2025). Penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Jawa Timur selama 2015-2024 menunjukkan disparities yang signifikan, dengan Kota Surabaya sebagai capaian tertinggi (Rp4.784,13 miliar) dan Kabupaten Sampang terendah (Rp37.482,80 juta). Perbedaan ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang beragam dalam desentralisasi (Alif et al., 2021).



Gambar 5. Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota Jawa Timur
(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data diolah, 2026)

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Astri et al. (2013), Ramadhani & Siwi (2022), Simamora et al. (2025), Mahulauw et al. (2017), dan Isyandi & Aulia (2022) menemukan pengaruh signifikan anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Namun, Prastiwi & Handayani (2021) menemukan belanja kesehatan berpengaruh negatif sedangkan belanja pendidikan positif. Ernita (2022) menyatakan belanja pendidikan tidak signifikan sedangkan belanja kesehatan signifikan. Aulia et al. (2023) menemukan keduanya tidak signifikan. Pada variabel pajak daerah, Saragih (2018) serta Putri & Ribawati (2025) menemukan pengaruh positif signifikan, sedangkan Suparlan & Rispawati (2025) menemukan pengaruh negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya di kabupaten/kota Jawa Timur yang memiliki variasi tingkat pembangunan

dan kemampuan fiskal daerah yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2024, guna memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif serta menjadi dasar perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diukur secara numerik melalui pengujian hipotesis berdasarkan data empiris (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan desain penelitian panel data, yakni pendekatan yang menggabungkan data lintas wilayah (*cross-section*) dan data deret waktu (*time series*) secara simultan. Desain ini dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antarprovinsi dan antarwaktu secara bersamaan, serta memiliki keunggulan dalam meminimalkan masalah multikolinearitas, meningkatkan efisiensi estimasi, dan mengontrol heterogenitas yang tidak teramati antar unit observasi (Baltagi, 2021; Gujarati & Porter, 2013).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Populasi mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdiri atas 38 pemerintah daerah, di antaranya 9 kota dan 29 kabupaten. Karena jumlah populasi relatif terbatas dan seluruh data tersedia secara lengkap selama periode penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Total observasi dalam penelitian ini adalah 380 unit observasi yang diperoleh dari 38 kabupaten dan kota dikalikan dengan 10 tahun periode pengamatan (2015–2024).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan resmi pemerintah dan lembaga penyedia data statistik. Data sekunder dipilih karena penelitian ini bersifat makroekonomi dengan unit analisis pemerintah daerah di Jawa Timur dan tidak tersedia dalam bentuk data primer. Sumber data yang digunakan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota Jawa Timur tahun 2015–2024, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk data realisasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota Jawa Timur tahun 2015–2024 yang diakses melalui portal resmi djpk.kemenkeu.go.id.

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: mengidentifikasi dan mengakses basis data resmi BPS dan DJPK Kemenkeu melalui portal daring masing-masing; mengunduh dan mencatat data variabel penelitian sesuai dengan periode dan cakupan wilayah yang telah ditetapkan; melakukan verifikasi konsistensi dan kelengkapan data untuk memastikan tidak terdapat data yang hilang (*missing values*); dan mengolah serta menyusun data ke dalam format panel data yang siap dianalisis.

Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (IPM) dan tiga variabel independen (anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan	Sumber Data
IPM (Y)	Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi: umur harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak	Nilai IPM kabupaten/kota tahunan	Indeks (0-100)	BPS
Anggaran Pendidikan (X1)	Realisasi belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan yang bersumber dari APBD	Total realisasi belanja pendidikan per kabupaten/kota per tahun	Miliar Rupiah	DJPK Kemenkeu
Anggaran Kesehatan (X2)	Realisasi belanja pemerintah daerah di sektor kesehatan yang bersumber dari APBD	Total realisasi belanja kesehatan per kabupaten/kota per tahun	Miliar Rupiah	DJPK Kemenkeu
Penerimaan Pajak Daerah (X3)	Total penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku	Total penerimaan pajak daerah per kabupaten/kota per tahun	Miliar Rupiah	DJPK Kemenkeu

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan EViews 12. Analisis regresi data panel menggabungkan data *cross-section* dari 38 kabupaten/kota dengan data *time-series* selama 10 tahun (2015–2024). Menurut Baltagi (2021), analisis regresi data panel memiliki keunggulan: mampu mengontrol heterogenitas individual yang tidak teramati, menghasilkan estimasi yang lebih efisien karena memiliki lebih banyak observasi, dapat mengidentifikasi efek yang tidak terdeteksi melalui data *cross-section* atau *time-series* murni, serta meminimalkan bias akibat agregasi data.

Model Estimasi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan model estimasi regresi data panel: *Common Effect Model* (CEM) yang mengasumsikan perilaku setiap unit observasi homogen tanpa perbedaan karakteristik antarindividu; *Fixed Effect Model* (FEM) yang mengakomodasi perbedaan karakteristik antarindividu melalui perbedaan nilai intersep dengan menggunakan variabel dummy; dan *Random Effect Model* (REM) yang mengasumsikan perbedaan karakteristik antarindividu tercermin dalam komponen *error term* dan diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS).

Metode Estimasi Data Panel

Pemilihan model estimasi dilakukan melalui tiga tahap uji. Uji Chow digunakan untuk menentukan antara CEM dan FEM, dengan kriteria jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah FEM. Uji Hausman digunakan untuk menentukan antara FEM dan REM, dengan kriteria jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah FEM. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan antara

CEM dan REM, dengan kriteria jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah REM.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera dengan kriteria jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal (Gujarati & Porter, 2013). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF, jika $VIF < 10$ maka model bebas multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser atau White, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model bebas heteroskedastisitas; jika terindikasi, dilakukan penyesuaian menggunakan *Robust Standard Error* (Gujarati & Porter, 2013). Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson atau LM Test, jika nilai DW berada di antara dU dan 4-dU maka model bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi data panel dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 AP_{it} + \beta_2 AK_{it} + \beta_3 PPD_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia daerah i pada tahun t

AP_{it} = Anggaran Pendidikan daerah i pada tahun t

AK_{it} = Anggaran Kesehatan daerah i pada tahun t

PPD_{it} = Penerimaan Pajak Daerah daerah i pada tahun t

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

ε_{it} = Error term

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap IPM. Kriteria: jika t-hitung $>$ t-tabel atau probabilitas $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan (Gujarati & Porter, 2013). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap IPM. Kriteria: jika F-hitung $>$ F-tabel atau probabilitas $< 0,05$, maka seluruh variabel independen berpengaruh signifikan (Sugiyono, 2019). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1 (Baltagi, 2021; Gujarati & Porter, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini mengkaji pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
IPM (Y)	70,2777	70,2950	78,7900	61,4900	4,1949
Anggaran Pendidikan (X1)	0,3696	0,3200	1,1700	0,0100	0,2215
Anggaran Kesehatan (X2)	0,2105	0,1800	0,6800	0,0000	0,1346
Penerimaan Pajak Daerah (X3)	206,7439	136,1400	2.527,28	22,4300	292,4919

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Variabel IPM memiliki nilai rata-rata 70,2777 yang menunjukkan tingkat pembangunan manusia di Jawa Timur berada pada kategori tinggi. Nilai maksimum 78,7900 dan minimum 61,4900 menunjukkan adanya variasi antar kabupaten/kota, dengan standar deviasi 4,1949 yang mengindikasikan penyebaran data relatif rendah. Kota Surabaya mencatat IPM tertinggi (84,14) dan Kabupaten Sampang terendah (64,65) pada tahun 2024.

Variabel Anggaran Pendidikan memiliki rata-rata 36,96% dengan standar deviasi 0,2215, menunjukkan variasi proporsi anggaran pendidikan antar daerah cukup beragam. Kota Mojokerto mencatat proporsi tertinggi (74%) dan Kota Surabaya terendah (6%) pada tahun 2024.

Variabel Anggaran Kesehatan memiliki rata-rata 21,05% dengan standar deviasi 0,1346, menunjukkan variasi proporsi anggaran kesehatan relatif lebih rendah dibandingkan anggaran pendidikan. Tuban mencatat proporsi tertinggi (69%) dan Kota Surabaya terendah (3%) pada tahun 2024.

Variabel Penerimaan Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata 206,74 miliar rupiah dengan standar deviasi 292,49 yang tinggi, menunjukkan kesenjangan kemampuan fiskal yang besar antar daerah. Kota Surabaya mencatat penerimaan tertinggi (2.738,90 miliar) dan Kabupaten Sampang terendah (15,14 miliar) pada tahun 2024.

Uji Model Estimasi Data Panel

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Uji	Nilai Prob.	Keputusan
Cross-section F	0,0000	FEM Terpilih

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Uji	Nilai Prob.	Keputusan
Cross-section random	0,0000	FEM Terpilih

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Hausman juga menghasilkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, yang mengonfirmasi FEM sebagai model terbaik. Dengan demikian, analisis regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Metode	Hasil	Keterangan
Normalitas	Jarque-Bera	Prob. 0,2079	Normal
Multikolinearitas	VIF	1,058-2,967	Bebas MK
Heteroskedastisitas	White Diagonal	Sig. 0,0444-0,0000	Terkoreksi

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Uji normalitas dengan Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas $0,2079 > 0,05$, sehingga data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF seluruh variabel < 10 (1,058-2,967), sehingga model bebas multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas awal menunjukkan gejala heteroskedastisitas pada variabel PPD (sig. 0,0005 $< 0,05$), sehingga dilakukan koreksi menggunakan metode *Robust Standard Error White Diagonal*. Setelah koreksi, seluruh variabel memiliki nilai probabilitas yang valid dan model layak digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	Keterangan
Konstanta (C)	72,74607	-	-	-
Anggaran Pendidikan (X1)	-8,662038	7,463694	0,0000	Signifikan
Anggaran Kesehatan (X2)	7,379597	3,691317	0,0003	Signifikan
Penerimaan Pajak Daerah (X3)	0,002397	2,018002	0,0444	Signifikan

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Persamaan regresi:

$$IPM = 72,74607 - 8,662038(AP) + 7,379597(AK) + 0,002397(PPD)$$

Nilai konstanta 72,7461 menunjukkan bahwa apabila ketiga variabel independen bernilai nol, maka IPM diperkirakan sebesar 72,7461 poin. Koefisien Anggaran Pendidikan (-8,6620) berarti setiap kenaikan 1% anggaran pendidikan akan menurunkan IPM sebesar 8,6620 poin. Koefisien Anggaran Kesehatan (7,3796) berarti setiap kenaikan 1% anggaran kesehatan akan meningkatkan IPM sebesar 7,3796 poin. Koefisien Penerimaan Pajak Daerah (0,0024) berarti setiap kenaikan Rp1 miliar penerimaan pajak daerah akan meningkatkan IPM sebesar 0,0024 poin.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Kesimpulan
Anggaran Pendidikan (X1)	7,463694	1,96626	0,0000	Signifikan
Anggaran Kesehatan (X2)	3,691317	1,96626	0,0003	Signifikan
Penerimaan Pajak Daerah (X3)	2,018002	1,96626	0,0444	Signifikan

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

F-hitung	F-tabel	Sig.	Kesimpulan
137,8365	2,6286	0,000000	Signifikan

(Sumber: EViews 12, data diolah 2026)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R ²	Keterangan
0,935241	93,52% variasi IPM dijelaskan variabel independen

Sumber: EViews 12, data diolah (2026)

Nilai F-hitung 137,8365 > F-tabel 2,6286 dengan signifikansi 0,000000 < 0,05, sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai Adjusted R² sebesar 0,935241 menunjukkan bahwa 93,52% variasi IPM dijelaskan oleh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah, sedangkan 6,48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap IPM

Hasil uji t menunjukkan Anggaran Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai t-hitung 7,463694 > t-tabel 1,96626 dan signifikansi 0,0000 < 0,05. Koefisien regresi sebesar -8,662038 menunjukkan setiap kenaikan 1% anggaran pendidikan justru menurunkan IPM sebesar 8,66 poin. Hasil ini tampaknya bertentangan dengan *Human Capital Theory* Becker (1962) yang menyatakan investasi pendidikan meningkatkan kualitas SDM. Namun, arah negatif ini dapat dijelaskan melalui inefisiensi pengelolaan anggaran, di mana anggaran pendidikan lebih banyak terserap pada belanja rutin dan administrasi dibandingkan investasi langsung pada peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, infrastruktur, dan pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil. Temuan ini sejalan dengan Lubis et al. (2024) dan Hakim et al. (2024) yang menemukan pengaruh negatif belanja pendidikan terhadap IPM di Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

Pengaruh Anggaran Kesehatan terhadap IPM

Anggaran Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai t-hitung 3,691317 > t-tabel 1,96626 dan signifikansi 0,0003 < 0,05. Koefisien regresi sebesar 7,379597 menunjukkan setiap kenaikan 1% anggaran kesehatan meningkatkan IPM sebesar 7,38 poin. Hasil ini konsisten dengan teori UNDP (1990) bahwa kesehatan merupakan dimensi utama IPM. Peningkatan anggaran kesehatan berdampak pada peningkatan akses layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan, serta penurunan angka kematian dan kesakitan. Temuan ini sejalan dengan Kurnia et al. (2023), Mongan (2021), dan Nurvita et al. (2022) yang menemukan pengaruh positif signifikan belanja kesehatan terhadap IPM.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap IPM

Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai t-hitung 2,018002 > t-tabel 1,96626 dan signifikansi 0,0444 < 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,002397

menunjukkan setiap kenaikan Rp1 miliar penerimaan pajak daerah meningkatkan IPM sebesar 0,0024 poin. Hasil ini konsisten dengan Saragih (2018) dan Putri & Ribawati (2025) yang menemukan penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pada sektor-sektor berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, yang tercermin pada peningkatan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita sebagai komponen utama IPM.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) terhadap 38 kabupaten/kota dengan total 380 observasi, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi anggaran pendidikan belum diikuti oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan yang memadai, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara optimal. Anggaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang menunjukkan bahwa peningkatan anggaran kesehatan telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup dan kualitas hidup secara keseluruhan. Penerimaan pajak daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang mencerminkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan manusia, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Secara simultan, ketiga variabel independen mampu menjelaskan 93,52% variasi IPM, sedangkan sisanya sebesar 6,48% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, & Nugroho. (2021). Pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 40–61.
- Althira, A. V., Haq, N. L. R., Putri, S. C., & Hartanto, A. D. (2025). Pengaruh Gini rasio dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2015-2024. **6*(1)*, 119–133.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 77–102.

- Aulia, Daeng, & Fatimah. (2023). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Mataram tahun 2012-2021. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 71–81.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5), 9–49.
- BPS. (2025). Indeks Pembangunan Manusia 2024. *Badan Pusat Statistik*.
- Darwin, D. (2022). Pengaruh belanja pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Djohan, S., Saptono, A., & Iranto, D. (2023). Analisis pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 3(3), 447–465. <https://doi.org/10.53067/ijebef.v3i3.117>
- Ernita, D. (2022). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerinci. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 258–270. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1849>
- Fauziah. (2024). Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan analisis pengaruh tingkat pendidikan dan kemiskinan di Jawa Tengah. *19*(1).
- Ferdiansyah, & Febrianti. (2025). Analisis pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 2017-2024. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1), 18–39. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i1.3315>
- Firmansyah, F., Mukhtar, S., & Sebayang, K. D. A. (2022). The effect of special autonomy funds, regional original revenue and local government expenditures on welfare in Papua Province. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)*, 2(3), 601–609. <https://doi.org/10.53067/ije3.v2i3.101>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hakim, Ariestingtyas, Mahalli, & Rizaldi. (2024). Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur: Analisis dampak belanja pemerintah daerah pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta tingkat kemiskinan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(2), 507–517. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.76175>
- Isyandi, Z. M. B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. *15*(1), 1–11.
- Kurnia, Valeriani, & Darmawan. (2023). The influence of government spending in education, health, and economics on indicators for calculation of Human Development Index in Bangka Belitung Islands Province. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6(7), 5158–5180. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i7-132>
- Liyan, N. F., Ayu, G., Ratnasari, I., Susanto, E., Selatan, T., Daerah, P., Indonesia, D., Vocation, B., & Journal, A. (2022). Pajak, dana bagi hasil pajak dan pembangunan daerah di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6, 112–121.
- Lubis, Sari, Syahfitri, & Joko. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor

- kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara tahun 2019-2022. *Jurnal Aurelia Masyarakat Pengabdian*, 3(1), 738–755.
- Mahulauw, Santosa, & Mahardika. (2017). Pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 27.
- Mongan, J. J. S. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Nurvita, D., Rohima, S., Bashir, A., & Mardalena, M. (2022). The role of public spending on education, health, and economic growth toward Human Development Index in the local economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(2), 197–210. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.197-210>
- Prastiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). Provinsi Jawa Tengah (studi kasus 35 kab/kota Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 135–147.
- Putri, & Ribawati. (2025). Analisis pengaruh pajak daerah, belanja bantuan. *Ilmu Ekonomi*, 4(3), 25–48.
- Putri, T. D. (2021). Analisis pengaruh tingkat pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang.
- Ramadhani, D. P., & Siwi, M. K. (2022). Pengaruh indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2019. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(2), 278–289. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i2.43>
- Saragih, A. H. (2018). An analysis of local taxes revenue's effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, 14(2), 197–211. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.21595>
- Simamora, S., Nurjannah, & Iskandar. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 9(2), 16–28.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparlan, & Rispawati. (2025). Analisis pengaruh dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *8*(1).
- UNDP. (2024). *About Human Development*. United Nations Development Programme.